

Rusak Tempat Ibadah Umat Hindu, Bule Denmark Diusir dari Bali

DENPASAR (IM) - Bule asal Denmark, Lars Christensen harus menanggung akibat tindakannya merusak pelinggih atau tempat ibadah umat Hindu di Bali. Dia segera dideportasi ke negara asalnya. "Yang bersangkutan saat ini ditahan di Rudenim Denpasar untuk menunggu proses deportasi," kata Kepala Kantor Hukum dan HAM Bali Jamaruli Manihuruk, Minggu (28/11). Christensen ditahan imigrasi setelah bebas murni dari Lapas Singaraja, Buleleng, Jumat (26/11). Dia telah selesai menjalani hukuman selama tujuh bulan terkait perbuatan penodaan agama.

Ulah Christensen sempat viral dan membuat warga Bali marah. Ia terekam video sedang menendang pelinggih rumah warga di Desa Kalibukbuk, Oktober 2020 silam. Di rumah itu, Christensen merusak dua pelinggih dengan cara menendang hingga membuat tempat sembahyang roboh dan jatuh ke tanah. Jamaruli mengatakan, Christensen telah melanggar Pasal 75 UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sehingga harus dideportasi. "Dia telah melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum," ujarnya. ● lus

Kepala BKN: ASN Wajib Batalkan Cuti Saat Libur Natal-Tahun Baru

JAKARTA (IM) - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menegaskan, aparat sipil negara (ASN) wajib membatalkan cuti pada saat libur Hari Raya Natal 2021 serta Tahun Baru 2022. "Bagi ASN yang sudah jauh-jauh hari berniat mengambil cuti akhir tahun, apalagi berlibur, segera batalkan," kata Bima.

Bima mengingatkan soal sanksi bagi aparat sipil negara (ASN) yang nekat cuti dan kemudian bepergian ke luar kota saat libur Natal dan Tahun Baru.

"Kalau ada ASN nekat, lalu pulang terinfeksi Covid-19 sampai mengakibatkan klaster di lingkungan tempat tinggalnya maka ini pelanggaran berat karena membahayakan negara. Sanksinya tentu juga berat," ujarnya sebagaimana dikutip dari Antara, Minggu (28/11).

"Mohon untuk bersabar dan tak euforia dulu. Tidak perlu akhir tahun berbondong-bondong ke suatu tempat dan tetap tinggal di rumah. Ini semua demi kebaikan bersama," kata Bima.

Bima menegaskan aparat sipil negara (ASN) wajib membatalkan cuti pada saat libur Hari Raya Natal 2021 serta Tahun Baru 2022. Terlebih, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjoe Kumolo telah menerbitkan larangan cuti akhir tahun ini. Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 26/2021 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian ke Luar Daerah dan/atau Cuti Bagi Pegawai ASN

Selama Periode Hari Raya Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019.

Peraturan tersebut merupakan tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 62/2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 pada saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022.

Kemudian, berdasarkan SE Menteri PANRB Nomor 13/2021, pembatasan cuti dan bepergian ke luar daerah untuk ASN juga telah diatur. ASN dilarang mengambil cuti dan bepergian ke luar daerah di minggu sama dengan hari libur nasional, baik sebelum maupun sesudah, yang berarti jatuh sejak 20 Desember 2021.

"Bagi ASN yang sudah jauh-jauh hari berniat mengambil cuti akhir tahun, apalagi berlibur, segera batalkan," kata Bima.

Larangan dikecualikan bagi ASN yang cuti melahirkan dan cuti sakit bagi PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). "Tentu ada dispensasi dalam keadaan ke darurat, seperti sakit atau melahirkan," katanya.

Dikutip dari laman Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dapat memberikan hukuman disiplin pada pegawai yang melanggar ketentuan yang berlaku. Pelanggaran dapat dilaporkan melalui tautan <https://laporwfh.menpan.go.id/login> paling lambat tiga hari kerja sejak berakhirnya berakhirnya periode Natal-Tahun Baru. ● mei

2 Polhukam

FOTO:ANT



KSAD Minta Prajuritnya TNI Rangkul KKB, Anggota DPR: Ini Pendekatan Humanis

Postur pertahanan TNI di Papua dianggap masih kurang sekitar 3.000 prajurit. Ideal harus ada pos militer di setiap 500 meter atau 5 kilometer di setiap wilayah.

JAKARTA (IM) - Anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizal mengapresiasi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman yang tengah berupaya melakukan pendekatan humanis dalam menyelesaikan konflik di Papua.

Hal itu disampaikan Bobby menanggapi pernyataan Dudung yang meminta prajuritnya untuk merangkul kelompok

kriminal bersenjata (KKB).

"Ini pendekatan humanis dan memastikan yang dikedepankan civil justice, bukan act of war seperti yang dikhawatirkan," ujar Bobby, dalam diskusi virtual yang digelar di Jakartam Minggu (28/11).

Bobby menyatakan, keinginan Dudung tersebut juga dapat membuat penanganan konflik di Papua menjadi satu atap. Mengingat, dalam penan-

ganan konflik di Bumi Cendrawasih, terdapat beragam aparat keamanan dan pertahanan yang dilibatkan dalam satuan tugas (satgas).

Dalam konteks ini, Bobby menyebut mereka sebagai "satgas gado-gado" karena aparat Badan Intelijen Negara (BIN), TNI, hingga Polri diterjunkan secara bersamaan.

"Kita kadang-kadang bingung juga, kok ada BIN, ada polisi, ada TNI. TNI-yu juga macam-macam, bukan Rider saja, ada yang lain, ini kiranya dengan Pak Dudung tersebut mungkin ini akan menguatkan koordinasi satu atap," kata Bobby.

Di sisi lain, Bobby juga menyebutkan, postur per-

tahanan TNI di Papua masih kurang sekitar 3.000 prajurit. "Secara formasi masih kurang 3.000 personel di sana (Papua), kurang. Postur keamanan di Papua itu masih sangat kurang," kata Bobby.

Ia menilai, postur pertahanan di Papua mempunyai formasi ideal apabila merujuk pada sebuah lokasi atau demografi. Misalnya, adanya pos militer di setiap 500 meter atau 5 kilometer di setiap wilayah.

Salah satu fungsi keberadaan pos ini adalah untuk menghubungkan satu lokasi

MENTERI BUMN DI TEBUIRENG JOMBANG

Menteri BUMN (Badan Usaha Milik Negara), Erick Thohir (kanan) bersama Pengasuh Ponpes Ora Aji Yogyakarta, Gus Miftah memberi motivasi kepada mahasiswa Universitas Hasyim Asy'ari (Unhasy) saat peringatan Maulid Nabi SAW dengan tema Sudah Rebahan, Wujudkan Perubahan, di gedung KH Yusuf Hasyim Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, Jawa Timur, Sabtu (27/11).

Bambang Soesatyo Persilakan KPK Lacak Aliran Dana Terkait Formula E

JAKARTA (IM) - Ketua MPR Bambang Soesatyo mempersilakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melacak aliran dana yang telah dikeluarkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait penyelenggaraan Formula E.

Seperti diketahui, Bambang telah ditunjuk oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai ketua steering committee ajang balap mobil listrik itu.

"Jadi kita harus wise, dewasa, ini kepentingan kita bersama, KPK silakan teruskan, proses, temukan, hukum, kalau ada ditemukan bukti-bukti yang cukup dan kuat adanya penyimpangan, penyalahgunaan jabatan dan kerugian negara," ujar Bambang, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (28/11).

Menurut Bambang, penyelenggaraan Formula E sebagai ajang internasional harus tetap berjalan dan disukseskan oleh semua pihak. Penyelidikan yang tengah dilakukan KPK, kata Bambang, harus dipisah dengan kegiatan olahraga.

"Jadi jangan dipukul rata, bahwa ada pihak-pihak atau orang nanti terbukti menyalahgunakan jabatan, menimbulkan kerugian negara, silakan diproses," ujar politisi Partai Golkar itu.

Selain itu, Bambang menuturkan, Pemprov DKI telah mengeluarkan anggaran untuk merealisasikan penyelenggaraan Formula E. Dengan demikian, anggaran itu tidak bisa dikembalikan jika Formula E gagal dilaksanakan.

"Itu artinya apa? Kita harus memanfaatkan apa yang sudah kita bayarkan ini di luar urusan hukumnya, harus bermanfaat bagi kepentingan rakyat kita," ucapnya.

Selain itu, Bambang menilai, ajang Formula E dapat memberikan manfaat secara ekonomi. Dia memcontohkan penyelenggaraan World Superbike (WSBK) di Mandalika. Ia mengklaim penyelenggaraan balapan tersebut berdampak positif pertumbuhan ekonomi

sebesar 5 persen hanya dalam seminggu. Bahkan, tidak hanya di Lombok, Bambang menyebutkan pertumbuhan ekonomi juga dirasakan hingga ke Bali.

"Hotel-hotel penuh, pererangan penuh, restaurant penuh, rumah-rumah penduduk banyak yang ditinggali oleh para turis kemudian UMKM juga tumbuh dari penjualan merchandise, souvenir. Jadi harus dilihat dari sisi itu," ucap politisi Golkar tersebut.

"Sehingga di Formula E ini kita selamatkan dari sisi ekonominya, dari sisi manfaatnya, bahwa ada proses-proses yang harus diselesaikan secara hukum silakan diselesaikan gitu lho katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, pihaknya akan melacak uang yang telah dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta benar-benar masuk ke pihak yang berwenang.

"Alasan-alasan kenapa Pemprov DKI membayar sekian-sekian dan transfernya ke mana, apakah ke pihak-pihak yang betul-betul punya kewenangan ya misalnya pemilik hak atas Formula E dan seterusnya (akan didalami)," kata Alex di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (25/11) lalu.

Penyelidik KPK, kata Alex, juga sedang mendalami commitment fee penyelenggaraan Formula E Jakarta yang lebih mahal dibandingkan dengan negara lain. Dugaan awal tingginya biaya penyelenggaraan ajang balap mobil tersebut karena Jakarta sebagai kota penyelenggara belum dikenal luas.

"Kenapa harus membayar lebih dibanding kota-kota yang lain. (Negara lain) mungkin dianggap sudah populer, sudah bisa menarik wisatawan untuk menyaksikan Formula E dan seterusnya," ucap Alex.

"Mungkin juga ada branch marking ke negara lain. Bisa saja misalnya kota-kota lainnya (yang menyelenggarakan Formula E) kan sudah terkenal," katanya. ● mei



FOTO:ANT

VAKSINASI SERENTAK INDONESIA

Petugas kesehatan dari Polresta Bogor Kota menyuntikkan vaksin COVID-19 kepada santri saat Vaksinasi Serentak Indonesia di Plaza Balaikota Bogor, Jawa Barat, Sabtu (27/11). Vaksinasi yang digelar serentak di 3.822 titik se-Indonesia dengan target 1,1 juta masyarakat tersebut sebagai salah satu strategi untukantisipasi terjadinya laju pertumbuhan COVID-19 di masa libur Natal dan Tahun Baru 2022.

Bertambah 264 Kasus Positif, di DKI Jakarta Jumlah Tertinggi

JAKARTA (IM) - Pemerintah kemabli memperbarui informasi perkembangan kasus harian Covid-19. Berdasarkan data yang dibagikan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 pada Minggu (28/11) sore, tercatat ada 264 kasus baru Covid-19 di seluruh Indonesia.

Data tersebut dihitung sejak Sabtu (27/11) pukul 12.00 WIB, hingga Minggu (28/11) pukul 12.00 WIB. Dengan penambahan itu, sehingga total kasus Covid-19 di Tanah Air 4.255.936. Jumlah ini dihitung sejak kasus pertama diumumkan pada Maret 2020.

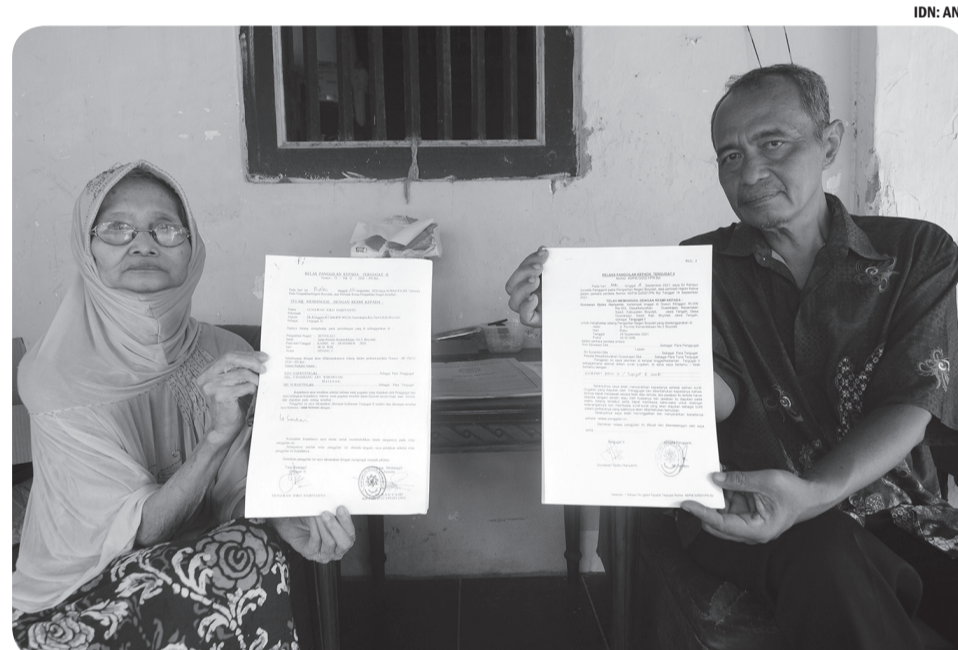
Adapun penambahan ini didapatkan dari hasil pemeriksaan terhadap 244.999 spesimen dalam 24 jam terakhir. Berdasarkan data tersebut, kasus baru pasien konfirmasi positif Covid-19 tersebar di 25 provinsi.

Terdapat 5 provinsi yang mencatatkan penambahan kasus baru tertinggi yakni DKI Jakarta, dengan 51 kasus baru, Jawa Tengah 33 kasus baru, Jawa Timur: 32 kasus baru. Kemudian, Riau 26 kasus baru, Jawa Barat 25 kasus baru, dan DI Yogyakarta 18 kasus baru.

Adapun secara keseluruhan, Covid-19 saat ini telah menyebar di 510 kabupaten/kota di 34 provinsi.

Dari data yang sama, pemerintah mencatat ada penambahan 275 pasien yang dinyatakan sembuh dari Covid-19 dalam sehari. Dengan demikian, total pasien yang telah sembuh dari infeksi virus Corona sebanyak 4.103.914 orang.

Meski demikian, masih ada 1 pasien yang meninggal dunia, sehingga, total pasien tutup usia akibat Covid-19 menjadi 143.808 orang. ● mar



IDN:ANT

IBU DIGUGAT ANAK KANDUNGNYA

Seorang ibu, Sri Surantini (kiri) didampingi anak pertamanya Gunawan Joko (kanan) menunjukkan surat panggilan pengadilan selaku tergugat di Guwokajen, Sawit, Boyolali, Jawa Tengah, Minggu (28/11). Sri Surantini bersama tiga anaknya digugat ke Pengadilan Negeri (PN) Boyolali oleh dua anak kandungnya yang lain Rini Sarwestri dan Indri Aliyanto terkait pembagian tanah warisan yang terkena pembangunan jalan tol Solo-Yogyakarta.

Penyidik KPK Periksa Dua Saksi terkait Aliran Uang yang Diterima Bupati Bintan

JAKARTA (IM) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua orang saksi untuk mendalami aliran uang yang diterima Bupati Bintan nonaktif Apri Sujadi terkait izin kuota rokok dan minuman beralkohol, di Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan (BP Bintan).

Dua saksi yang diminta keterangannya adalah ajudan Apri bernama Rizki Bintani, dan seorang pihak swasta bernama Norman. Keduanya diperiksa pada Jumat (26/11).

"Tim penyidik mendalami pengetahuan keduanya terkait dengan dugaan aliran uang yang diterima oleh tersangka AS (Apri) dan pihak terkaitnya baik sebelum diberikannya izin kuota rokok dan minuman beralkohol di BP Bintan hingga terbitnya izin dimaksud," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Sabtu (27/11).

Ali menuturkan, pada Kamis (25/11), penyidik juga telah memeriksa Apri sebagai tersangka untuk mengonfirmasi barang bukti yang telah diamankan KPK. Barang bukti itu berupa beberapa dokumen perizinan kuota rokok dan minuman beralkohol di BP Bintan yang diduga telah diatur siapa saja yang akan mendapat-

kan izin kuota tersebut.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan dua orang tersangka yakni Apri dan Kepala BP Bintan Mohd Saleh H Umar. KPK menduga Apri menerima uang Rp 6,3 miliar pada tahun 2017-2018, sedangkan Saleh Umar diduga menerima uang sekitar Rp 800 juta.

Kasus dugaan korupsi ini diperkirakan telah menyebabkan kerugian keuangan negara hingga Rp 250 miliar. Atas perbuatannya, Apri Sujadi dan Mohd Saleh H Umar disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. ● mei

PENGUMUMAN TENTANG PENGAMBILIHAN SAHAM

Guna memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (8) juncto Pasal 125 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini disampaikan pengumuman tentang rencana pengambilhian saham dalam PT AYAM EMAS INDONESIA, berkedudukan di Kabupaten Bogor ("Perseroan").

Sehubungan dengan rencana pengambilhian saham Perseroan tersebut, para kreditor dapat mengajukan keberatan tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah tanggal pengumuman ini, disertai alasan-alasan dan dokumen-dokumen asli yang mendukung kepada Perseroan dengan alamat :

PT AYAM EMAS INDONESIA
Kampung Janada Imperes
RT.001RW-008, Desa Jagabaya,
Kecamatan Parung Panjang,
Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat
Bogor, 29 November 2021
Direksi Perseroan

PENGUMUMAN

Sesuai ketentuan Pasal 133 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka dengan ini PT Solutino International suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Kota Jakarta Pusat ("Perseroan") mengumumkan bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Tertulis Seluruh Pemegang Saham No. 7 tanggal 4 November 2021, yang dibuat di hadapan Wwik Widyaningrum, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bekasi, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("Menhukum") sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0473197 tanggal 15 November 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0199853.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 15 November 2021, bahwa telah dilakukan pengalihan seluruh saham milik AP Chemical PTE. LTD. sejumlah 4.187 (empat ribu seratus delapan puluh tujuh) lembar saham dengan nilai nominal Rp. 400.000,- (empat ratus ribu Rupiah) per lembar saham dengan total nilai keseluruhan sebesar Rp. 1.674.800.000,- (satu miliar enam ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu Rupiah) kepada TRELIS GRACE HOLDINGS LIMITED dalam Perseroan.

Jakarta Pusat, 29 November 2021
PT Solutino International
Direksi

PENGUMUMAN

Bersama ini kami umumkan bahwa pemegang saham PT Arrow Chain Management Logistics berkedudukan di Jakarta Utara ("Perseroan") akan mengalihkan saham mayoritas kepada Pihak Kelga. Sebagai hasil dari pengalihan saham tersebut, maka akan terjadi perubahan pengendalian di Perseroan.

Pengumuman ini dilakukan untuk memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 29 November 2021

DIREKSI
PT ARROW CHAIN MANAGEMENT LOGISTICS

PENGUMUMAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Seluruh Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. KONSTRUKLINRI LLC CEMERLANG berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, tertanggal 23 November 2021, nomor : 47, dibuat dihadapan BLJAITO SILITONGA, SH, Notaris di Jakarta, pemegang saham PT. KONSTRUKLINRI LLC CEMERLANG, telah memutuskan membarukan perseroan.

Kepada para pihak yang mempunyai kepentingan atau tagihan terhadap perseroan, harap segera mengajukan tagihannya disertai bukti-bukti yang sah, dalam waktu 60 (enam puluh) hari tertanggal sejak tanggal pengumuman ini.

Demikian pengumuman ini dibuat untuk memenuhi ketentuan pasal 147 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Likuidator
PT. KONSTRUKLINRI LLC CEMERLANG